



Dewan Belum Putuskan Dana Pilkada

★ Banggar : Perlu Waktu
Khusus Membahas

Bila dipenuhi kebutuhan dana Pilkada yang diperkirakan mencapai Rp 70 miliar itu akan dipastikan akan menyedot banyak sekali APBD.

SINGARAJA, NusaBali

Buntut kebutuhan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diestimasi membengkak hingga tiga kali lipat, kalangan DPRD Buleleng belum berani

angkat bicara. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng, belum berani memutuskan usulan kebutuhan biaya Pilkada tahun 2017, yang diusulkan KPU Buleleng di APBD tahun 2016.

Banggar berencana membahas secara detail usulan tersebut, kendati usulan tersebut rasional dan sesuai dengan dasar hukum yang ada. Ketua Banggar I Gede Supriatna di ruang kerjanya, Senin (12/10) mengakui, jika kebutuhan dana Pilkada yang diperkirakan mencapai Rp 70 miliar itu akan dipastikan akan menyedot APBD. Kendati demikian, sudah menjadi kewajiban Pemkab menyediakan anggaran Pilkada.

"Pada dasarnya pilkada nanti berjalan dengan tertib, aman

dan tidak terganjal dengan permasalahan anggaran. Kami belum mengomentari nilai anggaran yang ditetapkan, yang jelas kita akan bahas bersama instansi terkait dalam pekan ini," kata Supriatna yang juga Ketua DPRD Buleleng.

Terkait munculnya wacana usulan dana pilkada dialokasikan dalam dua tahun anggaran, Supriatna mengatakan, sah-sah saja dalam proses pembahasan muncul usul atau saran yang disampaikan anggota dewan. Penyusunan anggaran secara bertahap itu bisa saja dilakukan asalkan pihak eksekutif bisa menjamin dapat merealisasikan anggaran di awal tahun. Sementara dari pengalaman se-

belumnya, anggaran pada induk APBD baru bisa direalisasikan paling lambat pada Maret di tahun yang berjalan.

Sementara dari penjelasan komisioner KPU Buleleng belum lama ini menyebut kalau anggarannya dialokasikan secara bertahap dikhawatirkan dapat mengganggu tahapan pelaksanaan pilkada. Pasalnya, mulai pertengahan tahun 2016 dan menginjak Januari 2017 mendatang KPU harus sudah memiliki dana yang siap digunakan untuk membiayai tahapan pilkada.

"Opsinya seperti itu wajar saja muncul dalam pembahasan anggaran di lembaga. Namun apapun itu, kami optimis nanti usulan dana pilkada ini akan segera kita

tetapkan dalam dokumen APBD Tahun 2016 yang mulai dibahas Kamis (15/10) pekan ini," tegas Supriatna sembari diiyakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Wisnaya.

Sebelumnya, pelaksanaan Pilkada Buleleng yang dihelat Februari 2017 mendatang menelan total anggaran senilai Rp 70 miliar. Total dana pilkada ini terdiri usulan proposal KPU Buleleng senilai Rp 48,6 miliar. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan anggaran senilai Rp 10 miliar, dan usulan dana untuk kepolisian yang dirancang Rp 9 miliar. Sedangkan untuk pos anggaran untuk TNI hingga kini belum ada usulan proposal yang diajukan kepada pemerintah daerah. **k19**

Edisi : Selasa, 13 Oktober 2015

Hal : 4



Pelimpahan 14 Tersangka SPPD Fiktif Ditunda

Satu Tersangka Naik Tensi

DENPASAR, NusaBali

Rencana pelimpahan 14 tersangka kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif bernilai ratusan juta rupiah di Dispenda Gianyar, dari penyidik Polda Bali ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Senin (12/10), ditunda. Salah satu penyebabnya, salah seorang di antara 14 tersangka, Suc, yang kini pegawai Dinas Sosial Gianyar, mendadak menderita tensi naik.

Informasi di Mapolda Bali, Senin (12/10), kuat dugaan sakit mendadak Suc itu akibat akumulasi psikis karena ketakutan akan ditahan oleh penyidik Kejati Bali. Pengacara Suc, Hidayat SH, juga tak berani menjamin kondisi kesehatan kliennya jika sampai pelimpahan ini berujung penahanan klien ini di Rutan Gianyar.

Penyebab lain, diduga penyidik di Polda Bali kewalahan melakukan pemeriksaan marathon yang sekaligus dengan banyak tersangka. 14 tersangka menggunakan lima pengacara dengan berkas kasus masing-masing. Di antara lima pengacara itu, selain ada Hidayat SH juga ada pengacara senior, Wayan Warsa T Bhuwana SH. 14 pengacara didampingi pengacara masing-masing, tiba di Polda Bali sekitar pukul 07.00 Wita - 14.00 Wita, bertemu para penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali.

Salah seorang tersangka, Wayan Wirtama mengakui, kasus dirinya dan 13 temannya itu ditunda dilimpahkan ke Kejati Bali dan Kejari Gianyar. "Mungkin karena masih ada beberapa teman (tersangka, Red)

yang belum menjalani cek kesehatan di Polda," jelas pegawai Dinas Pariwisata Gianyar ini.

Ia dan para tersangka lain melalui pengacara masing-masing telah bersiap memohon penangguhan penahanan setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejati.

Sebelumnya, penyidik Polda Bali menyatakan akan melimpahkan tahap II kasus ini berikut barang bukti dan tersangka ke Kejati Bali pada Senin (12/10). Kasi Penkum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan yang dikonfirmasi membenarkan rencana pelimpahan tahap II kasus dugaan korupsi SPPD fiktif Gianyar dengan 14 tersangka. "Tapi sampai sekarang belum ada datang," ujar Ashari yang dikonfirmasi, Senin sore.

Ia mengatakan tidak mengetahui secara pasti penyebab batalnya pelimpahan tersebut. Pasalnya belum ada keterangan apapun dari pihak Polda Bali. Ashari malah balik meminta wartawan untuk menanyakan pembatalan ini ke Dit Reskrimsus Polda Bali.

Belum ada keterangan resmi dari Polda Bali terkait batalnya pelimpahan ini. Salah satu penyidik yang sempat ditemui memastikan pelimpahan kasus SPPD fiktif Gianyar batal dilakukan. "Pelimpahannya batal hari ini (Senin kemarin, red). Tanya ke pimpinan saja kapan pelimpahan berikutnya," ujar penyidik yang enggan disebutkan namanya ini. **rez, Isa**

Edisi : Selasa, 13 October 2015

Hal : 6



Penuhi Kewajiban Konstitusional, RAPBD 2016 Diserahkan ke Dewan Yudha Saka: APBD Instrumen Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat

MANGUPURA, NusaBali

Penjabat Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka didampingi Sekkab Badung Kompyang R Swandika, menyampaikan apresiasi atas komitmen bersama dalam melakukan pembahasan APBD secara tepat waktu. Sejak diserahkan, Senin (12/10), RAPBD Badung tahun 2016 direspons langsung oleh DPRD Badung dengan melakukan agenda pembahasan melalui rapat kerja dengan eksekutif.

"Melalui proses pembahasan RAPBD tahun 2016 secara lebih awal ini maka tugas konstitusional bersama ini telah mulai berproses," ujar Yudha Saka, usai menerima laporan Kepala Bappeda Litbang Wayan Suambara, Senin (12/10).

Menurutnya, pembahasan RAPBD yang tepat waktu menjadi penting dilakukan mengingat APBD 2016 merupakan instrumen untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik yang baik, terutama pelayanan terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di berbagai bidang dan sektor. Ini sepenuhnya diorientasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Kabupaten Badung.

"Dengan diserahkan Rancangan Angga-



PENJABAT Bupati Badung
I Nyoman Harry Yudha Saka

• IST

ran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016 secara tepat waktu ini maka kewajiban konstitusional bersama antara pemerintah dan dewan akan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan dan penajaman dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan krama Badung," tuturnya.

Sementara, Suambara melaporkan bahwa RAPBD sesuai arahan Penjabat Bupati telah diserahkan secara tepat waktu kepada DPRD Badung, di mana komposisi RAPBD Badung 2016, yakni kontribusi terhadap pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 3,5 triliun lebih. Capaian ini terdiri dari PAD sebesar Rp 2,9 triliun lebih, dana perimbangan Rp 314,7 miliar lebih, dan pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 352 miliar lebih.

Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja dirancang sebesar Rp 3,6 triliun lebih, terdiri dari belanja tidak langsung Rp 2 triliun lebih dan belanja langsung sebesar Rp 1,5 triliun lebih. Sedangkan komposisi belanja daerah berdasarkan penerima manfaat sebesar Rp 3,6 triliun lebih, di mana belanja publik sebesar 63,13 persen. @

Edisi : Selasa, 13 Oktober 2015

Hal : 2



Sejumlah Hotel Keberatan Pajak Online

MANGUPURA - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Badung terus didesak agar meminimalkan kehilangan potensi pajak yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Saat rapat kerja dengan Komisi III DPRD Badung kemarin (12/10), Dispenda menyebut tidak berani menjanjikan kenaikan pajak signifikan seperti tuntutan kalangan dewan. Namun, dewan tetap menginginkan agar pajak terus digenjut. Apabila ada hotel membandel, dewan mengusulkan pencabutan izin operasional. Sedangkan Kadispenda Badung Wayan Adi Arnawa menyebut ada beberapa hotel yang keberatan menerima *website* yang ditanam di *server* mereka.

"Pajak ini kalau bisa setiap tahun naik Rp 500 miliar. Kami melihat potensi itu ada," ujar Ketua Komisi III DPRD Badung, Nyoman Satria saat memimpin rapat.

Hal senada diungkapkan Made Sumerta. Politisi PDI Perjuangan itu meminta agar Dispenda lebih jeli menjaga potensi pajak agar tidak menghilang.

"Saya melihat banyak hotel berbintang

dibangun, ini juga harus memberikan pemasukan signifikan pada daerah. Kalau perlu, target Dispenda minimal pajak dapat Rp 3 triliun," desak Sumerta ■

► Baca **Sejumlah...** Hal 39

Dewan Sepakat Bentuk Pansus

■ SEJUMLAH

Sambungan dari hal 29

Mantan ketua Komisi II itu memberikan usul agar pemerintah tegas kepada wajib pajak membandel: "Kalau tidak mau membayar pajak, cabut saja izin operasionalnya. Dalam hal ini mesti tegas," imbu Sumerta.

Menanggapi desakan dewan, Kepala Dispenda Kabupaten Badung Wayan Adi Arnawa mengatakan, tantangan terberat sejatinya berada pada mental wajib pajak (WP) itu sendiri. Sekalipun pihaknya sedang merencanakan pemasangan 200 *website* pada tahun 2016. Pada tahun 2015 ini, sudah dilakukan uji coba pemasangan 30 *website*. "Kalau mengkaji ulang izin hotel tak membayar pajak kami sangat setuju. Memang bila perlu tarik izinnya," kata Arnawa. *Website* ini nantinya akan

ditanam pada *server* hotel dan restoran. *Website* ini merekam setiap transaksi hotel dan restoran. Laporan ini diklaim cukup *real time*. "Setiap lima menit akan ada data masuk ke *server* Dispenda. Data ini didapat dari *website* yang ditanam di *server* hotel," terang Adi Arnawa.

Yang menarik, meski sudah dipasang *tapping box*, masih banyak hotel yang menggunakan kalkulator dalam menghitung transaksi. Bahkan, dirinya mengaku pernah melihat salah satu hotel yang menggunakan kalkulator.

Menurut Adi Arnawa, pemasangan *website* ini baru satu-satunya di Indonesia. Pajak online di Jakarta baru sebatas pemasangan *tipping box*. Ditanya alasan berani melakukan terobosan tanpa ada pengalaman, Adi Arnawa menjawab ringan. "Daripada saya diam tidak berbuat apa-apa. Saya yakin dengan *website* ini ada pening-

katan. Tapi, nilainya kami tidak berani menyebutkan, karena perlu evaluasi berkelanjutan," papar mantan camat Kuta Utara itu.

Namun, pemasangan ini bukan berarti tanpa kendala. Pejabat asal Pecatu itu mengaku banyak wajib pajak (WP) yang keberatan saat hendak dipasang *website*. Berbagai macam alasan diungkapkan agar *server* tidak jadi ditanam. Kondisi seperti itu membuat Dispenda harus memutar otak. Adi Arnawa mengaku harus ada kontrak menghadapi WP seperi itu. "Sekarang ini harus ada dukungan dari wajib pajak. Kalau dibilang ada kebocoran, kami sudah berupaya. Caranya, dengan bantuan alat *website*. Kalau dengan pegawai saja saya pesimistis sulit mencapai target," tukasnya.

Ditanya biaya yang dibutuhkan untuk proyek *website*, Adi

Arnawa kembali tidak berani menjawab. "Butuh biaya besar, ya lumayan besar," tukasnya.

Saat pemasangan *tapping box* peningkatan pajak naik 30 sampai 40 persen pada beberapa wajib pajak. Saat ini, hasil pajak daerah pada APBD induk tahun 2015 sebesar Rp 2,5 triliun, APBD setelah perubahan Rp 2,8 triliun, atau bertambah Rp 250 miliar. Pada tahun 2016, pihaknya akan mendafta 1.000 wajib pajak untuk dipasang *website*. "Kami tetap pasang *tapping box* khususnya pada restoran, sedangkan hotel tetap pada *website* servis," tukasnya.

Dewan menyepakati membentuk pansus sistem pajak online. Hanya saja, dewan masih bingung untuk mencari studi banding pansus. Informasi yang dirangkum koran ini, dewan menggunakan kesempatan tersebut untuk pergi ke luar negeri. (san/yes)

Edisi : Minggu, 11 Oktober 2015

Hal :

21 dan 31